

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Penelitian

Dari analisis yang telah dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, serta teori yang digunakan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar memerlukan adanya payung hukum demi mengoptimalkan sinergi yang dilakukan serta adanya beberapa program yang nyata dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

5.1.1. Upaya Pencegahan Radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pencegahan radikalisme dan terorisme masih belum optimal. Hal tersebut diketahui dari adanya upaya yang tidak dilakukan pada kontra-radikalisasi, yakni (1) pada upaya kontra narasi, tidak adanya sosialisasi program kontra-radikalisasi secara berkesinambungan, dan tidak adanya pelatihan untuk menyusun narasi untuk mengontra dan narasi alternatif menghadapi bahaya terorisme; (2) pada upaya kontra-propaganda, kemampuan kementerian agama masih belum mumpuni untuk melakukan pengolahan data konten propaganda paham radikal; (3) pada kontra-ideologi tidak ditemukan bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Kodim dalam pendidikan Bela Negara. Selain itu upaya pencegahan terpusat pada masyarakat, padahal lingkungan Pemerintah, TNI dan Polri juga patut menjadi perhatian.

Lebih lagi, masih ada konflik internal terkait aspek ekonomi dan harga diri. Bimas Keagamaan, merasa tidak dianggap dengan adanya konsep tiga pilar. Padahal pada dasarnya, dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya radikalisme dan terorisme, Bimas hadir sebagai

perpanjangan tangan dari KUA. Lain lagi tentang tanggung jawab, masalah insentif juga menjadi salah satu poin yang menjadi perhatian, mengingat insentif akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga, yang mana secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja.

5.1.2. Bentuk Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1208/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

Sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS memiliki bentuk komunikasi dan koordinasi yang mana sama-sama saling membangun dengan tujuan memperkuat sinergi yang ada. Namun, berdasarkan upaya yang ada dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, sinergi dapat lebih dioptimalkan yang mana berdasarkan tinjauan dari 3 aspek, yakni aspek komunikasi, koordinasi, serta aspek hukum, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi terhadap masyarakat belum terjadi dengan cukup baik, mengingat belum pernah dilakukannya Kosmos mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme bahkan setelah terjadinya bom bunuh diri di depan gereja Cathedral Makassar. Selain itu, ada oknum yang berada pada sisi pemerintahan yang kurang menggunakan kekuasaannya untuk memberikan inisiatif terbaik dalam melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga komunikasi sosial yang dilakukan terkesan asal-asalan. Sementara komunikasi yang dilakukan kepada organisasi vertikal dan horizontal memiliki nilai yang cukup baik, mengingat tingginya tingkat koordinasi walau tanpa ada dasar hukum yang mengatur kerja sama yang dilakukan.

b. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan sangat baik. Koordinasi dikatakan baik karena selama ini dalam kerja sama yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian tidak terjadi miskomunikasi, malahan adanya rasa saling pengertian dan saling membantu yang tinggi sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada kendala berarti walaupun tidak ada aturan maupun perjanjian hitam di atas putih antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS. Namun, koordinasi akan berjalan dengan lebih baik lagi ketika ada hukum yang mengikat di antara kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

c. Hukum

Sudah bersinergi dengan melakukan kerja sama dalam berbagai upaya, seperti sosialisasi terkait radikalisme dan terorisme, patroli bersama, dan sebagainya, namun tidak ada payung hukum yang melindungi sinergi yang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perjanjian kerja sama yang jelas dan tertulis, hanya menyesuaikan dengan keadaan sehingga kemungkinan untuk timbulnya tumpang tindih tugas sangat besar. Selain itu tidak adanya payung hukum juga mengganggu pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam mencapai tujuan yang disepakati.

5.2. Saran

Dari seluruh upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, upaya yang belum dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pengoptimalan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, mengingat bahaya dari radikalisme dan terorisme adalah nyata dan perlu dilakukan suatu upaya yang serius agar dapat meminimalisir efek buruk dari radikalisme dan terorisme, terutama pada wilayah Kota Makassar.

Terkait bentuk sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS, agar sinergi yang tercipta menjadi lebih nyata dan terstruktur sehingga upaya yang dilakukan dalam sinergi tersebut dapat mencapai tujuan secara maksimal, diperlukan suatu payung hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS, mengingat radikalisme dan terorisme merupakan salah satu ancaman nyata yang terjadi, sehingga sinergi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS akan lebih valid. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama untuk membuat dan melaksanakan program penataran Bela Negara, dimana konsep dan materinya dapat dimusyawarahkan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS, dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Jika tidak ada tindak lanjut terkait permasalahan yang ada, maka sinergi yang selama ini berjalan tidak memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga mengakibatkan posibilitas penyalahgunaan kewenangan meningkat. Jika hal tersebut terjadi, maka upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar akan sulit untuk berjalan dengan efektif, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat terpapar paham radikal dan terjadinya aksi terorisme.